

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2020)

Adrian Fernando Simangunsong, *Mengkritisi Hukum Pengadaan Tanah & Penilaian Ganti Kerugian Era UU Cipta Kerja*, Cetakan ke I, (Jakarta.: PT. RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, 2023)

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2007)

Bha'iq Roza Rakhmatullah, *Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah*, Cetakan ke-I, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2023)

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan UUPA isi dan pembahasannya*, (Jakarta: djambatan, 2005)

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke 8, (Jakarta.: PT. Balai Pustaka, 1989)

G. Kartasapoetra *et.al*, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*:Rineka Cipta, (Jakarta: Bina Aksara, 1985)

Juansih, *Polri, disrupsi, dan IKN Nusantara*, Cetakan ke I, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2022)

- Julexi Tambayong *et.al*, *Indeks Pertahanan Wilayah Kalimantan: Analisis Pertahanan Wilayah di Kalimantan untuk Pembangunan IKN*, (Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023)
- John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Sinar Grafika), 1988)
- Nandang Isnandar dan Hadi Arnowo, *Prinsip Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*, Cetakan ke I, (Banyumas: SIP Publishing, 2021)
- Orinton Purba *et.al*, *Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang*, Cetakan ke I (Jambi:PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Rahmat Ramadhani, *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*, Cetakan ke I (Medan: Umsu Press, 2022)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Umar Said Sugiharto, *Hukum Pengadaan Tanah: Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, (Malang: Setara Press, Cetakan II, 2015)
- Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Cetakan ke I, (Jakarta: Kencana, 2017)

Jurnal Nasional

Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharani, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol 2, No 2 2023.

Edi Rohaedi *et.al*, “Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Pakuan Law Review* Vol 5, Nomor 1 Januari-Juni 2019. DOI: [10.33751/palar.v5i2.1192](https://doi.org/10.33751/palar.v5i2.1192)

Kornelis Antonius Ada Bediona *et.al*, “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol 2, No 01 Januari 2024. DOI: 10.11111/dassollen.xxxxxxx

Martua Sirait, Chip Fay, A. Kusworo, “Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur”, *Southeast Asia Policy Research Working Paper*, No. 24, 1999.

Mulyadi, “Asas Dan Prinsip Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum”, *Jurnal Varia Hukum*, Vol 28, No 34, September 2017. DOI: <https://doi.org/10.32502/jvh.v28i34.948>

Nabil Abduh Aqil *et.al*, “Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara”, *Jurnal Recht Studiosum Law Review*, Vol 1, No 2 November 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.32734/rslr.v1i2.9670>

Restu Adi Putra *et.al*, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kesesuaian Keperuntukan Tanah dalam Pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara Ditinjau dari Dampak Lingkungan”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol 06, No 01 Januari 2023. DOI: <https://doi.org/10.30737/transparansi.v6i1.4593>

Rikardo Simarmata, “Tumpang Tindih Penguasaan Tanah di Wilayah Ibu Kota Negara “Nusantara””, *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol 9, Nomor 1 Juli 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.25123/vej.v9i1.6504>

Sirjon Tenong *et.al*, “Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021” , *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk*, Vol 5, Nomor 2 Oktober 2021. DOI: <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i2.1279>

Urip Santoso, “Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum”. *Jurnal Perspektif*, Vol XXI, No. 3 September 2016. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.588>

Wilson Fernando, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat IKN, dengan Tinjauan Terhadap Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Ulayat”, *Mandalika Law Journal*, Vol 1, Nomor 1 Mei 2023. DOI: <https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1545>

Hasil Penelitian

Bagus Dwi Santoso, “Pembubaran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir

- Indonesia”. Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018
- Boy Alexander Darakay, “Penyelesaian Sengketa Hak Tanah Ulayat Untuk Perkebunan Kelapa (BekasHGUsaha) WAMAR Utara Dalam Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum ”. Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012
- Graceyana Jennifer, “Penegakan hukum perlindungan konsumen melalui personifikasi artificial intelligence influencer sebagai subjek hukum periklanan”. Skripsi, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022, hal. 69
- I Ketut Suardita, “Pengenalan Bahan Hukum”. Skripsi, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017
- Johannes Sondang Hamonangan Dolok Saribu, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Adopsi Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Skripsi, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2022
- “Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa.”, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2024

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah
Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat
Pemerintahan Ibu Kota Nusantara

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Persetujuan Lingkungan di Wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Tata
Cara Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penetapan Rencana Detail Tata
Ruang Di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Website/Internet

Aisyah Sekar Ayu Maharani, “ 2.086 Hektar Lahan IKN Masih Bermasalah, Termasuk Untuk Jalan Tol”.

<https://ikn.kompas.com/read/2024/04/22/181346187/2086-hektar-lahan-ikn-masih-bermasalah-termasuk-untuk-jalan-tol>, diakses pada 13 November 2024

Anissa Ayu, “ Pemerintah Kebut Pengadaan Tanah di IKN”.
<https://www.metrotvnews.com/read/kewCIORn-pemerintah-kebut-pengadaan-tanah-di-ikn>, diakses pada 1 Oktober 2023

CNN Indonesia, “Hari Masyarakat Adat dan HGU Dua Abad Di Tanah IKN”.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240809175701-20-1131324/hari-masyarakat-adat-dan-hgu-dua-abad-di-tanah-ikn>, diakses pada 12 November 2024

Desi Permatasari, “Realitas Hak Masyarakat Adat di Tengah Gempuran Pembangunan”, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/realitas-hak-masyarakat-adat-di-tengah-gempuran-pembangunan>, diakses pada 26 November 2024

Detikcom, “Letak Ibu Kota Baru Indonesia Bernama Nusantara, Ini Detail Lokasinya”.
<https://news.detik.com/berita/d-5908269/letak-ibu-kota-baru-indonesia-bernama-nusantara-ini-detail-lokasinya>, diakses pada 6 Desember 2023

Diva Lufiana Putri, “5 Tahap Pembangunan IKN Dimulai 2022 Selesai 2045”.
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/01/170000965/5-tahap->

[pembangunan-ikn-dimulai-2022-selesai-2045?page=all#google_vignette](https://ekonomi.bisnis.com/read/20220505/47/1530180/ibu-kota-negara-ikn-nusantara-pengadaan-tanah-andalkan-dua-skema),

diakses pada 10 November 2024

Faustina Prima Martha, “Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Pengadaan Tanah Andalkan Dua Skema”.

[https://ekonomi.bisnis.com/read/20220505/47/1530180/ibu-kota-negara-](https://ekonomi.bisnis.com/read/20220505/47/1530180/ibu-kota-negara-ikn-nusantara-pengadaan-tanah-andalkan-dua-skema)

[ikn-nusantara-pengadaan-tanah-andalkan-dua-skema](https://ekonomi.bisnis.com/read/20220505/47/1530180/ibu-kota-negara-ikn-nusantara-pengadaan-tanah-andalkan-dua-skema), diakses pada 1

Oktober 2023

Iqbal Basyari, “Antisipasi Persoalan Tanah Masyarakat Adat di IKN”.

[https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/06/antisipasi-persoalan-tanah-](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/06/antisipasi-persoalan-tanah-masyarakat-adat-di-ikn)

[masyarakat-adat-di-ikn](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/06/antisipasi-persoalan-tanah-masyarakat-adat-di-ikn), diakses pada 1 Desember 2023

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Pertama Kali, Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi HUT Ke-79 RI di IKN”.

https://www.setneg.go.id/baca/index/pertama_kali_presiden_jokowi_pimpin

[upacara_peringatan_detik_detik_proklamasi_hut_ke_79_ri_di_ikn](https://www.setneg.go.id/baca/index/pertama_kali_presiden_jokowi_pimpin), diakses

pada 17 November 2024

Muhdany Yusuf Laksono, “Ini Bocoran Skema Pengadaan Tanah di IKN Nusantara”.

[https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/11/191826621/ini-bocoran-](https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/11/191826621/ini-bocoran-skema-pengadaan-tanah-di-ikn-nusantara)

[skema-pengadaan-tanah-di-ikn-nusantara](https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/11/191826621/ini-bocoran-skema-pengadaan-tanah-di-ikn-nusantara), diakses pada 1 Desember 2023

Muhdany Yusuf Laksono, ‘Dilantik Prabowo, Basuki Resmi Menjadi Kepala

Otorita IKN”. <https://ikn.kompas.com/read/2024/11/05/113657387/dilantik->

[prabowo-basuki-resmi-jadi-kepala-otorita-ikn](#), diakses pada 12 November 2024

Otorita Ibu Kota Nusantara, “Letak Ibu Kota Baru Indonesia Bernama Nusantara, Ini Detail Lokasinya”.

<https://www.ikn.go.id/en/letak-ibu-kota-baru-indonesia-bernama-nusantara-ini-detail-lokasinya>, diakses pada 6 Desember 2023

Otorita IKN, “Letak Ibu Kota Baru Indonesia Bernama Nusantara, Ini Detail Lokasinya”.

<https://www.ikn.go.id/letak-ibu-kota-baru-indonesia-bernama-nusantara-ini-detail-lokasinya>, diakses pada 17 November 2024

Pelaksana BPK JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, “Konsep Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”.

<https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pengadaan-tanah.pdf>, diakses 18 Juli 2024

RED, “Ini 4 Tahap Pengadaan Tanah dalam Permen ATR/BPN 19/2021”.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-4-tahap-pengadaan-tanah-dalam-permen-atr-bpn-19-2021-lt6103ab27b87f8/>, diakses pada 1 Desember 2023

Rizki Alsendra, “Ganti Rugi Lahan IKN Hanya Rp. 130 Ribu per Meter, Warga Adat: Lebih Bagus Jual ke China”, <https://www.inilah.com/ganti-rugi-lahan-hanya-rp130-ribu-warga-sekitar-ikn-lebih-bagus-jual-ke-china>, diakses pada

<https://www.inilah.com/ganti-rugi-lahan-hanya-rp130-ribu-warga-sekitar-ikn-lebih-bagus-jual-ke-china>, diakses pada 26 November 2024

Subagian Hukum Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, “Tahapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum”.

https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/04/1.-Tulisan-Hukum-Tahapan-Pengadaan-Tanah_edit.pdf, diakses pada 1 Oktober 2023

Tempo.co, “Pemerintah Klaim Pembangunan Infrastruktur Utama Di IKN Rampung”.

<https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-klaim-pembangunan-infrastruktur-utama-di-ikn-rampung-12165>, diakses pada 15

November 2024

Kamus

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan. 1 Edisi Keenam, (Jakarta: Balai Pustaka, 2023).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Wawancara

Hasil wawancara dengan Dr. Gunanegara, S.H., M.Hum, Pengajar Hukum Agraria,

Gd. D Fakultas Hukum, Karawaci, Tanggal 5 Desember 2023, Pukul 11.00 wib.

Hasil wawancara dengan Arman, Masyarakat adat IKN, via *zoom*, Tanggal 21

Oktober 2024, Pukul 14.50 wib.

Hasil wawancara dengan Lutfi Ramadhan, Kepala Seksi Pelayanan Umum

Kelurahan Pemaluan via *zoom*, Tanggal 31 Oktober 2024, Pukul 12.00 wib.